

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KECURANGAN (FRAUD) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN)**

Moh. Risqi Kurnia Adi, Komala Ardiyani, Arum Ardianingsih

Universitas Pekalongan  
Fakultas Ekonomi

Email: [arum.feunikal@gmail.com](mailto:arum.feunikal@gmail.com)

## **ABSTRACT**

THE PERCEPTION OF AN INCREASE IN ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF THE GOVERNMENT SECTOR, ESPECIALLY FOR EMPLOYEES SHOULD BE CARRIED OUT CONTINUOUSLY. THIS STUDY AIMS TO PROVIDE EMPIRICAL EVIDENCE THAT LAW ENFORCEMENT, THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL, INFORMATION ASYMMETRIES, COMPLIANCE COMPENSATION, PROCEDURAL JUSTICE, ORGANIZATIONAL ETHICAL CULTURE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT EFFECT ON FRAUD. METHODS OF DATA COLLECTION IS DONE BY PURPOSIVE SAMPLING AND EARNED THIRTY-FIVE (35) RESPONDENTS. THE DATA USED ARE PRIMARY DATA. MECHANICAL ANALYSIS INCLUDES TESTING THE QUALITY OF THE DATA AND THE CLASSICAL ASSUMPTION TEST AND MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS WITH T TEST AND F TEST RESULTS SHOWED THAT ALL VARIABLES TESTED SIMULTANEOUSLY CAPABLE OF AFFECTING CHEATING. PARTIALLY, INFORMATION ASYMMETRY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT SIGNIFICANT EFFECT ON FRAUD (FRAUD). WHILE SIMULTANEOUSLY ENFORCEMENT, INTERNAL EFFECTIVENESS, APPROPRIATENESS OF COMPENSATION, PROCEDURAL FAIRNESS, AND ETHICAL INFLUENCE THE ORGANIZATION HAS NO SIGNIFICANT EFFECT AGAINST FRAUD (FRAUD).

**Keywords:** Fraud, the government sector.

## **PENDAHULUAN**

Membangun persepsi yang baik adalah sebuah keniscayaan terutama disektor publik/pemerintah. Sektor publik di Indonesia setelah reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Institusi pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Reformasi pemerintah juga memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi penyimpangan.

Penyimpangan dalam banyak kasus berbentuk tindakan korupsi. Tindak korupsi berupa manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor pemicu terjadinya kecurangan pada pemerintah daerah dilakukan oleh Novita Puspasari & Eko Suwardi (2012), meneliti mengenai Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah dan hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan pada individu dengan level penalaran moral tinggi untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada elemen pengendalian internal di organisasi.

Kecurangan sering dikaitkan dengan penegakan hukum, pengendalian intern dan asimetris informasi. Penegakan hukum di pemerintah daerah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan daerah tersebut termasuk dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penegakkan hukum terkait dengan peraturan dan undang-undang yang mampu mengendalikan pemerintah daerah agar pengelolaan APBD berjalan secara transparan sesuai dengan kepentingan publik. Jika pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka memungkinkan terjadi kecurangan dari orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan tersebut. Keefektifan pengendalian internal penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Ketidakefektifan pengendalian internal akan dapat membuka kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau kecurangan (*fraud*) karena pegawai akan memanfaatkan ketidakefektifan pengendalian internal itu sebagai suatu titik lemah perusahaan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Pengendalian intern yang baik memungkinkan meminimalisir terjadi asimetri informasi. Kondisi asimetri informasi dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Asimetri informasi dapat diminimalkan dengan pemberian *reward* berupa kompensasi kepada pegawai. Kesesuaian kompensasi mempengaruhi tindakan dan kinerja pegawai. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Hal yang juga harus diperhatikan adalah keadilan procedural. Keadilan yang dimaksud disini berkaitan dengan prosedur pemberian gaji atau kompensasi kepada pegawai. Pemberian gaji atau kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui undang-undang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*).

Pembenaran (*rationalization*) merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu pegawai untuk merasionalkan tindak kecurangan. Rasionalisasi dapat ditekan apabila manajemen instansi memiliki etika. Dalam hal ini etika manajemen akan menjadi tolak ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan. Individu sering merasa apa yang dilakukan sudah benar. Karena sebagian besar rekannya melakukan hal yang sama walaupun sebenarnya itu bentuk kecurangan. Komitmen organisasi mengarahkan individu melakukan berbagai tindakan. Karena komitmen organisasi dari pegawai dapat meminimalkan kecenderungan perilaku menyimpang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal (PI), asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh secara parsial penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal (PI), asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis

organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan?

### **Persepsi dan Kecurangan (*Fraud*)**

Persepsi merupakan rangsangan yang menghasilkan penafsiran berbeda-beda pada individu yang berbeda. Persepsi memiliki sifat subyektif. Persepsi individu akan suatu objek terbentuk dengan adanya peran dari *perceiver*, *target*, dan *situation*. Jadi persepsi merupakan tanggapan dari individu terhadap suatu objek, subjek, dan peristiwa yang dialaminya.

Membangun persepsi pegawai tentang kecurangan sebagai tindakan menyimpang perlu dilakukan. Karena kecurangan (*Fraud*) menurut standar *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam Sawyer (2006:339) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Hardianto, 2011:3).

### **Hubungan Penegakan Hukum terhadap Kecurangan (*Fraud*).**

Menurut Asshiddiqie (2008) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit proses penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku di suatu negara. Kecurangan dapat disebabkan adanya ketidaksadaran pentingnya menaati hukum maupun kurang ketegasan dalam penegakan hukum. Kesadaran untuk mematuhi hukum akan timbul apabila penegakan hukum dapat berjalan semestinya. Dengan adanya penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Peneliti mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan

### **Hubungan Efektifitas Pengendalian Internal (PI) terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Perkembangan pengendalian internal pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Keberhasilan SPIP tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi. PP SPIP

menyebutkan bahwa penerapan system pengendalian internal harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Ketidakefektifan pengendalian internal dapat membuka kesempatan bagi pegawai melakukan tindakan menyimpang atau kecurangan (*fraud*). Karena pegawai akan memanfaatkan ketidakefektifan pengendalian internal itu sebagai suatu titik lemah perusahaan atau instansi dan melancarkan aksinya dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut;

H2: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan

### **Hubungan Asimetri Informasi terhadap Kecurangan (Fraud)**

Asimetri informasi adalah kondisi ketidakselarasan saluran informasi antara pihak yang memiliki informasi atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan (Wilopo, 2006:26). Dengan kata lain asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya dengan melakukan berbagai cara yang kecenderungannya mereka berbuat curang. Dalam penelitian Wilopo (2006) dihasilkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Berdasarkan kondisi ini maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

### **Hubungan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (Fraud)**

Kompensasi merupakan balas jasa berupa uang atau barang yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedang penelitian Sulistyowati (2007) menyatakan bahwa kepuasan gaji berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Pemberian kompensasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka akan mendorong pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Peneliti mengajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

### **Hubungan Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan (Fraud)**

Setiap pegawai pasti menuntut adanya keadilan dari instansi tempat mereka bekerja. Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh pegawai mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses yang dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich,2007:161). Apabila prosedur dijalankan dengan baik akan menciptakan suatu keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal itu dapat mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*).

Keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

### **Hubungan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud)**

Etika diartikan sebagai refleksi kritis dan penalaran logis tentang sikap yang etis. Etika membentuk budaya. Budaya etis di lingkungan kerja menyangkut penerapan etika manajemen secara baik dan konsisten. Etika manajemen menjadi tolak ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan.

Penelitian Sulistyowati (2007) menyatakan ada pengaruh kultur organisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Penerapan budaya atau kebiasaan manajemen yang sesuai dengan etika yang ditetapkan akan menurunkan tingkat tindakan kecurangan (*fraud*).

H6: Budaya etis manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan

### **Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud)**

Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa kepercayaan, keterlibatan dan loyalitasnya terhadap organisasi yang bersangkutan. Komitmen organisasi merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas individu terhadap organisasi. Komitmen organisasi mengarahkan seorang individu dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai rasa memiliki dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di organisasinya maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

H7: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kausal yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada. Objek dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan) di Kota Pekalongan.

Pengukuran variabel kecurangan (Y) dan variabel penegakan hukum (X1), efektifitas pengendalian internal (X2), asimetri informasi (X3), kesesuaian kompensasi (X4), keadilan prosedural (X5), budaya etis organisasi (X6) dan komitmen organisasi (X7) dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan, (2) Pegawai bagian keuangan, (3) Memiliki pendidikan minimal S1, (4) Pegawai yang telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun.

Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan uji Reabilitas. Uji asumsi klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas. Sementara uji hipotesis mempergunakan uji regresi linier berganda, uji T dan uji F.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengambil sampel pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mengelola keuangan daerah kota Pekalongan tahun 2015. Dari penyebaran kuesioner maka didapatkan tiga puluh lima responden yang merupakan data penelitian bisa diolah.

### Uji Validitas

Hasil uji validitas dari masing-masing pernyataan penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis organisasi, komitmen organisasi serta kecurangan(*fraud*), disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas**

No.	Variabel	Item Pernyataan	Sig (2-tailed)	Keterangan
1.	Penegakan Hukum	X1_1	0,000	Valid
		X1_2	0,000	Valid
		X1_3	0,000	Valid
		X1_4	0,000	Valid
2.	Efektifitas Pengendalian Internal	X2_1	0,000	Valid
		X2_2	0,000	Valid
		X2_3	0,000	Valid
		X2_4	0,000	Valid
		X2_5	0,000	Valid
3.	Asimetri Informasi	X3_1	0,000	Valid
		X3_2	0,000	Valid
		X3_3	0,000	Valid
		X3_4	0,000	Valid
		X3_5	0,000	Valid
		X3_6	0,000	Valid
4.	Kesesuaian Kompensasi	X4_1	0,000	Valid
		X4_2	0,000	Valid
		X4_3	0,000	Valid
		X4_4	0,000	Valid
		X4_5	0,000	Valid
		X4_6	0,000	Valid
5.	Keadilan prosedural	X5_1	0,000	Valid
		X5_2	0,000	Valid
		X5_3	0,000	Valid
		X5_4	0,000	Valid
		X5_5	0,000	Valid
6.	Budaya etis organisasi	X6_1	0,000	Valid
		X6_2	0,000	Valid
		X6_3	0,000	Valid
		X6_4	0,000	Valid
7.	Komitmen organisasi	X7_1	0,000	Valid
		X7_2	0,000	Valid
		X7_3	0,000	Valid
		X7_4	0,000	Valid
		X7_5	0,000	Valid
8.	Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Y_1	0,000	Valid
		Y_2	0,000	Valid
		Y_3	0,000	Valid
		Y_4	0,000	Valid
		Y_5	0,000	Valid
		Y_6	0,000	Valid
		Y_7	0,000	Valid
		Y_8	0,000	Valid

Sumber : Data primer diolah 2015.

## Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas yang tersaji dalam tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Penegakan Hukum	0,713	Reliabel
2	Keefektifan Pengendalian Internal	0,717	Reliabel
3	Asimetri Informasi	0,704	Reliabel
4	Kesesuaian kompensasi	0,711	Reliabel
5	Keadilan prosedural	0,712	Reliabel
6	Budaya etis organisasi	0,716	Reliabel
7	Komitmen organisasi	0,706	Reliabel
8	Kecurangan ( <i>fraud</i> )	0,855	Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2015

Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Nilai *One-Sample Kolmogorove-Smirnov Test* didapat sebesar 0,531 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,941 > 0,05. Artinya data terdistribusi secara normal. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* ≥ 0,10 dan nilai *VIF* ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas. Berdasarkan hasil pengujian maka penegakan hukum memiliki nilai *VIF* sebesar 1,155, efektifitas pengendalian internal sebesar 1,222, asimetri informasi sebesar 1,594, kesesuaian kompensasi sebesar 1,565, keadilan prosedural sebesar 2,056, budaya etis organisasi sebesar 1,633, dan komitmen organisasi sebesar 1,412. Artinya semua variabel independen bebas dari gejala multikolonieritas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (homokedastisitas). Berdasarkan hasil pengujian maka penegakan hukum memiliki nilai *sig* sebesar 0,904, efektifitas pengendalian internal memiliki nilai *sig* sebesar 0,559, asimetri informasi dengan nilai *sig* sebesar 0,173, kesesuaian kompensasi dengan nilai *sig* sebesar 0,641, keadilan prosedural dengan nilai *sig* sebesar 0,789, budaya etis organisasi dengan nilai *sig* sebesar 0,889, dan komitmen organisasi dengan nilai *sig* sebesar 0,738. Artinya semua variabel independen bebas dari gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil olah data dengan menggunakan program SPSS maka didapatkan output regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 3 Regresi Linear Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	58,704	15,297		3,838	,001
tot_x1	-,681	,514	-,190	-1,326	,196
tot_x2	-,398	,372	-,157	-1,070	,294
tot_x3	,741	,294	,424	2,518	,018
tot_x4	-,736	,364	-,337	-2,019	,053
tot_x5	-,310	,465	-,127	-,666	,511
tot_x6	,585	,422	,236	1,386	,177
tot_x7	-1,144	,362	-,501	-3,165	,004

a. Dependent Variable: tot\_y

Persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalah :

$$Y=58,704-0,681X_1-0,398X_2+0,741X_3-0,736X_4-0,310X_5+0,585X_6-0,144X_7+e$$

### **Pengaruh Penegakkan Hukum terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,196. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka Penegakan Hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) dengan arah penelitian negatif. Artinya Penegakan hukum daerah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan daerah tersebut termasuk dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan itu sendiri termasuk salah satu pengendalian dari pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tersebut berjalan secara transparan sesuai dengan kepentingan publik. Jika pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, akan memungkinkan terjadinya kecurangan dari orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan tersebut. Penegakan hukum dalam instansi pemerintah lebih cenderung pada penetapan tata tertib/peraturan yang ada di instansi pemerintah. Seluruh pegawai instansi pemerintah (DPPKAD) Kota Pekalongan datang, pulang serta dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, dan para pegawai bertanggung jawab atas pekerjaannya serta tidak menyerahkan pekerjaannya kepada rekan kerja yang tidak memiliki kewenangan dalam pekerjaan tersebut sehingga dalam konstek penegakkan hukum ini tidak bisa mendeteksi kemungkinan pegawai yang terlihat patuh hukum namun kenyataannya melakukan *fraud*.

### **Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (*fraud*)**

Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,296, ini lebih besar dari 0,05 maka Keefektifan pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*). Dengan arah penelitian yang negatif. Perkembangan pengendalian internal pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, tentang system pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP, merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini pegawai instansi mematuhi prosedur dan sistem sesuai dengan alur tugas dan tanggung jawab. Tetapi pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal tidak dilakukan secara terus menerus sehingga akan membuka peluang bagi pegawai instansi untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

### **Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan (*fraud*).**

Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,018, nilai ini berarti lebih kecil dari 0,05 maka Asimetri Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) dengan arah penelitian negatif. Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006:26). Dalam penelitian ini pegawai instansi yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan serta mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan instansi memiliki kecenderungan untuk tidak menshare informasi yang ada secara transparan dan akuntabel. Alasan yang sering dikemukakan adalah informasi keuangan secara terinci bersifat rahasia dan apabila informasi keuangan diberikan kepada pihak luar akan membahayakan bagi instansi. Perilaku ini membuat mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

### **Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,053, nilai ini berarti lebih besar dari 0,05 maka Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) dengan arah penelitian positif. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2009:118). Dalam penelitian ini, instansi akan memberikan kompensasi yang pantas atas kinerja yang baik dari pegawai sehingga meminimalkan terjadinya kecurangan(*fraud*). Akibatnya pegawai merasa memperoleh imbalan yang semestinya sesuai dengan hak dan tugas yang telah diselesaikan secara baik.

### **Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich, 2007:161). Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,511, artinya keadilan prosedural memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) dengan arah penelitian negatif. Dalam penelitian ini para pegawai instansi pemerintah beranggapan bahwa prosedur penggajian dan pemberian kompensasi di instansi sesuai dengan yang diinginkan pegawai, serta melibatkan pegawai sehingga prosedur tersebut dapat diterima dengan baik. Prosedur penggajian dan pemberian kompensasi tidak berhubungan dengan pihak tertentu serta didasarkan pada informasi yang akurat.

### **Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*).**

Berdasarkan uji t dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,177 artinya budaya etis organisasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kecurangan(*Fraud*) dengan arah penelitian positif.

Etika organisasi merupakan pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi secara keseluruhan sehingga membentuk budaya organisasi(*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan (Fernanda, 2006:). Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima organisasi untuk bertindak, memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi (Schein dalam Wirawan, 2007:8). Budaya etis organisasi pada penelitian ini lebih cenderung pada konsistensi dan duplikasi. Karena para pegawai menjadikan perilaku pimpinan sebagai panutan. Seorang individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan apalagi melihat bahwa pimpinan juga melakukan hal yang sama. Terkadang individu merasa apa yang dilakukan sudah benar karena sebagian besar rekannya melakukan hal yang sama walaupun yang dilakukan itu suatu bentuk kecurangan.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*fraud*).**

Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa kepercayaan, keterlibatan, dan loyalitasnya terhadap organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan uji parsial (uji t) dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,004 artinya komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) dengan arah penelitian yang negatif. Pegawai instansi pemerintah cenderung berkomitmen pada organisasi jika kondisi dan situasi dari hasil tugas dan tanggungjawab menguntungkan bagi dirinya namun terjadi hal yang sebaliknya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum, Efektifitas pengendalian internal, Kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan(fraud) disektor pemerintahan. Tetapi pada variabel asimetri informasi dan Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti menyarankan agar pegawai instansi pemerintah di Kota Pekalongan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai pegawai instansi pemerintahan dengan cara menaati kode etik dan peraturan yang telah diterapkan oleh instansi. Sampel Penelitian selanjutnya mengambil auditor BPK maupun BPKP. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode kuesioner tetapi juga menambahkan metode lain seperti metode wawancara dalam memperoleh data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2008.
- dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2: 1(1-17).. 2006.
- Fernanda. *Etika Organisasi Pemerintah Modul Pendidikan dan Pelatihan Golongan I dan II. Modul Prajabatan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2006.
- Hardianto. *Pengendalian Manajemen: Fraud*. <http://lpp.ac.id/images/downloads/lppcom/foldl/janllfraud.pdf>. 2011. Diakses Desember 2015.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Ivancevich, et al. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi*
- Puspasari, Novita dan Eko Suwardi. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi. Universitas Gajah Mada. 2012.
- Sawyer, Lawrence B, Mortimer A. Dittenhofer dan James H.Scheiner. *Internal Auditing*. Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- Sulistyowati, Firma. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi*. JAAI. Vol.11 no.1. UII Yogyakarta. 2007.
- Tuanakotta. *Audit Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007.
- Wirawan, Nata. *Budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.